

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berperan dalam rangka usaha untuk mewujudkan suatu perubahan dan pertumbuhan secara tersusun yang oleh bangsa dan Negara untuk mencapai kemajuan agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan pembangunan juga diarahkan kepada cara berpikir dari masyarakat tradisional menuju modern seperti halnya saat ini (Siagian, dalam Nasir 2021:3). Menurut Sutoro (2015) dalam Indriyanti (2017:2) mengatakan pembangunan desa merupakan suatu upaya meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Proses pembangunan desa melibatkan seluruh lapisan desa baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam upaya pembangunan desa diharuskannya memiliki sasaran tepat dalam pembangunan walaupun minimnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Sembel, 2017:8). Sarpin (2014:6) mengemukakan beberapa tujuan yang mampu dicapai dan ditingkatkan terhadap kegiatan pembangunan desa: 1) pembangunan ekonomi masyarakat, (2) pengembangan kualitas sumber daya manusia, (3) pembangunan infrastruktur pedesaan, (4) pencapaian pembangunan desa yang akurat, (5) manajemen pembangunan desa sebelum melakukan proses pembangunan, diharuskan adanya suatu perencanaan pembangunan terlebih dahulu. Langkah awal perencanaan pembangunan yang diambil oleh seperangkat desa yang berwenang dalam proses pembangunan desa dengan tujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di desa sehingga warga desa dapat menikmati dari hasil pembangunan yang terealisasikan.

Upaya dalam keberhasilan program pembangunan tidak selalu bergantung dengan upaya yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bergantung terhadap peran yang diambil masyarakat dalam program yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan pembangunan desa. Menurut Ndraha (2008) dalam (Agustin, 2016:2) dalam setiap pelaksanaan pembangunan peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada setiap tahap pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan,

pemanfaatan, sampai dengan evaluasi. Penjelasan terkait perlunya masyarakat dalam keikutsertaan terhadap perencanaan pembangunan sesuai dengan opini Conyers (Agustin, 2016:2) dimana dia memberikan tiga alasan penting bagaimana partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam penyusunan rencana yang memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan :

1. Salah satu cara memperoleh informasi tentang sikap masyarakat, kebutuhan, dan kondisi adalah dengan partisipasi masyarakat.
2. Masyarakat harus memiliki rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap program kegiatan pembangunan dan akan lebih percaya jika mereka dilibatkan dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan, karena masyarakat akan lebih mengetahui keseluruhan program kegiatan.
3. Dengan mendorong partisipasi masyarakat akan diasumsikan partisipasi dalam pembangunan merupakan suatu hak demokrasi.

Dalam setiap kegiatan dalam rangka pembangunan memerlukan peran partisipasi aktif masyarakat dalam mengutarakan aspirasinya terutama pada proses perencanaan pembangunan dikarenakan pada tahapan tersebut memerlukan aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan yang akan dilakukan. Menurut Fitrianiingsih (2016:7) mengatakan aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan atau ide mengenai kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Hal ini menitikberatkan pada usaha dalam penyampaian ide-ide baru atau dapat dijadikan sebagai penilaian masyarakat atas keberhasilan program-program pembangunan di lingkungan daerahnya antara pihak pemerintah dan masyarakat. Pada proses tersebut, adanya pertukaran informasi dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dan seluas-luasnya dengan tujuan untuk mencapai pembangunan desa. Pembangunan desa pada dasarnya memerlukan aspirasi dari masyarakat karena masyarakat itu sendiri yang akan merasakan hasil dari pembangunan. Tentunya aspirasi dari masyarakat memiliki unsur-unsur penting

karena didalamnya terdapat keinginan dan kebutuhan dari masyarakat dalam menunjang kehidupannya dan masyarakat menjadi sasaran dalam pembangunan. Salah satu bentuk kegiatan pemerintah merupakan partisipasi dari masyarakat di desa itu sendiri, dimana adanya hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu bentuk kedua pihak saling membutuhkan dan dibutuhkan. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pembangunan desa memerlukan peran komunikasi sebagai media penyampaian gagasan antara masyarakat dan pemerintah, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi pembangunan. Menurut Zulyadi (2018) dalam (Idawati, 2022:43) bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu cara dan upaya dalam menyampaikan gagasan dan ide-ide pembangunan yang berasal dari pihak yang mengusulkan pembangunan dan ditujukan untuk masyarakat luas dengan tujuan agar masyarakat dapat menerima, memahami, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program pembangunan, serta pemecahan masalah yang ada di tingkat desa, harus adanya cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk berinteraksi, bekerjasama, dan berkomunikasi dengan masyarakat desa. Menurut Nurman (2015) dalam Sangian (2018:1) strategi untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan daerah dan desa dengan memberikan peran sentral kepada masyarakat sebagai penggerak utama proses pembangunan. Dalam konsep ini, masyarakat dari berbagai lapisan di tingkat lokal memiliki peran sebagai perencana dan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Partisipasi dalam proses pembangunan yaitu berupa aspirasi atau harapan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga pemerintah desa harus bisa melakukan pendekatan agar partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan, hal itu sejalan dengan bagaimana cara pemerintah desa terhadap pengelolaan aspirasi masyarakat dalam pembangunan sebagai strategi pemerintah desa agar masyarakat dapat mengutarakan aspirasinya dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangun desa dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu agar partisipasi masyarakat dapat tercipta dalam proses pembangunan desa.

Menurut Wan-Ling Huang dan Mary K. Feeney (2015:13) menyebutkan ada beberapa aspek yang bertujuan untuk menciptakan atau terbentuknya partisipasi masyarakat diantaranya atas kinerja berbasis apresiasi, motivasi pelayanan publik, nilai kesesuaian, partisipasi masyarakat sebelumnya, dan aturan partisipasi. Semua aspek tersebut memiliki caranya tersendiri untuk membentuk partisipasi masyarakat semisal motivasi pelayanan publik adalah kepala desa bisa mengatur atau memotivasi seperangkat desa dan yang membantu desa seperti dusun, dengan memotivasi semuanya dengan baik akan membuat kinerja semuanya akan berperan dengan baik yang dapat mempengaruhi terbentuknya partisipasi masyarakat.

Pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam meratakan pembangunan di seluruh nusantara termasuk desa yang menjadi fokus utama dalam pembangunan (Teja,2015:65). Hal itu juga tentu juga berlaku di Desa Kebonjati Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, dimana pembangunan seperti, pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk memajukan masyarakat desa setempat. Dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kebonjati bahwa partisipasi masyarakat sebagai hal yang penting dalam setiap tahap pembangunan yang dilakukan di desa karena dengan partisipasi masyarakat kesuksesan pembangun dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan observasi penulis dan wawancara pra-penelitian dengan Sekretariat Desa Kebonjati (Popong Hadijah di kantor Desa Kebonjati). Berdasarkan dari sumber wawancara dengan sekretariat Pemerintah Desa Kebonjati dikatakan bahwasannya “Kehadiran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan terutama pada aspirasinya, supaya hasil pembangunan dapat bermanfaat bagi Desa Kebonjati serta untuk mencapai partisipasi masyarakat aktif, pemerintah desa memiliki cara pengelolaan aspirasi tersendiri terhadap masyarakat supaya menciptakan partisipasi aktif” Berdasarkan dokumentasi Pemerintah Desa Kebonjati kehadiran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan salah satunya dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan. Bahwa kehadiran partisipasi masyarakat masih kurang maksimal dalam musyawarah rencana pembangunan terhadap dokumentasi yang peneliti

dapatkan yaitu dalam musyawarah rencana pembangunan (APB Desa) Tahun 2022. Dalam pelaksanaan musrenbang APBDes, pemerintah desa mengundang seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan Musrenbang (APB Desa Kebonjati) Tahun 2023	
Jabatan / Unsur	Jumlah yang Hadir
KPM	2
BPD	2
RT	13
RW	8
LPM	4
KADER	3
WARGA	1
PKK	1
KADUS	1
JUMLAH	35

Tabel 1.1 Kegiatan Musrenbang APBDes Kebonjati

Sumber: Arsip Desa Kebonjati (2023)

Berdasarkan dokumentasi Pemerintah Desa Kebonjati mengenai musyawarah rencana pembangunan yaitu musrenbang APBDes, ditemukan antusias kehadiran masyarakat sangat sedikit dengan jumlah satu orang. Dengan data dokumentasi tersebut bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih kurang maksimal.

Setelah penulis melakukan pengamatan, Pemerintah Desa Kebonjati memiliki cara tersendiri untuk mengelola aspirasi masyarakat dalam pembangunan agar mencapai partisipasi masyarakat yang aktif. Tetapi peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang aktif dalam pengelolaan aspirasi yaitu dalam musrenbang APBDes padahal pada musrenbang tersebut pemerintah desa mengundang seluruh lapisan masyarakat atau terbuka untuk umum bukan hanya diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki jabatan saja tapi masyarakat yang hadir dengan jumlah yang sedikit yaitu satu orang sehingga partisipasi masyarakat

masih kurang aktif. Dengan begitu bahwa cara pemerintah desa dalam pengelolaan aspirasi untuk menciptakan partisipasi yang aktif masih belum tercapai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian lebih mendalam tentang cara pemerintah desa dalam pengelolaan aspirasi masyarakat agar menciptakan partisipasi masyarakat yang aktif dengan judul **“Analisis Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Kebonjati Kabupaten Sumedang.”**

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Desa Kebonjati sudah berjalan dengan baik atau tidak karena dalam pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam apa saja cara pemerintah desa dalam mengelola aspirasi untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang aktif.

1.3 Identifikasi Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Desa Kebonjati?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memiliki kegunaan. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu dibidang ilmu komunikasi. Selain itu, beberapa penemuan yang didapatkan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi untuk penelitian-penelitian dengan bidang kajian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui pengelolaan aspirasi oleh Pemerintah Desa Kebonjati. Selain itu, memberi masukan kepada Pemerintah Desa Kebonjati dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.

1.5 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama 11 bulan yang dimulai bulan Oktober sampai Agustus 2023

No	Tahapan Penelitian	2022			2023							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
1.	Mencari tema dan topik penelitian											
2.	Pencarian dan pengumpulan data											
3.	Penyusunan Bab 1											
4.	Penyusunan Bab 2											
5.	Penyusunan Bab 3											
6.	Evaluasi bab 1 - 3											
7.	Pendaftaran <i>Desk Evaluation</i>											
8.	Mengumpulkan data-data yang diperlukan											

9.	Pengolahan Data											
10.	Penyusunan Bab 4											
11.	Penyusunan Bab 5											
12.	Pendaftaran Sidang											

Tabel 1.2 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti (2023)